

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**Alfian Sapta Wardani
Dwi Sudaryati**

Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi aparat SKPD Banjarnegara pejabat eselon tiga dan empat dan sampel dalam penelitian sebanyak 113 responden. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda Banjarnegara. Evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda Banjarnegara.

Kata kunci: partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, kesulitan tujuan anggaran, kinerja

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan elemen penting dalam suatu organisasi. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh organisasi. Selanjutnya, mengingat pentingnya fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi maka proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran perlu dilakukan agar dapat disesuaikan dengan tujuan anggaran.

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD

disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran pemerintah mengacu pada rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja). Dalam menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan dalam penyusunan APBD.

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik termasuk di pemerintah daerah. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.

Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Suatu lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang paling produktif. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Dengan kata lain partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kinerja.

Pemerintah daerah pada umumnya membuat anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasinya. Karakteristik tujuan anggaran diharapkan dapat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kerja individu pada institusi pemerintah daerah. Menurut Kenis (1979) dalam Mia (2012) menyimpulkan bahwa dalam membuat anggaran pada pemerintah daerah terdapat beberapa karakteristik tujuan anggaran diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran (*budgetary participation*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*) serta kesulitan tujuan anggaran (*budget goal*

difficulty) yang terkadang masih dianggap tidak mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

Beberapa penelitian mengenai karakteristik tujuan anggaran antara lain; Munawar, dkk (2006) menemukan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Penelitian selanjutnya oleh Wahyuni (2008) menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan anggaran dan kesulitan anggaran berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan kinerja aparat pemerintah daerah. Evaluasi anggaran hanya berpengaruh pada kinerja aparat dan umpan balik anggaran hanya berpengaruh pada perilaku dan sikap aparat daerah Yogyakarta.

Penelitian lain oleh Istiyani (2009) menemukan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan pencapaian tujuan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, namun evaluasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat daerah Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian Mediaty (2010) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari data statistik realisasi PAD Kota di Jawa Tengah di dapatkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara masih dalam urutan menengah kebawah dibandingkan Kabupaten lain di Jawa Tengah. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Sheira (2009) menyebutkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Banjarnegara sudah cukup baik dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, namun rasio tingkat ketergantungan masih sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu diteliti kinerja Kabupaten Banjarnegara dari aspek non finansial yaitu kinerja aparat pemerintah daerah yang dilihat dari karakteristik tujuan anggaran dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah ?
2. Apakah kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah ?
3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah ?
4. Apakah kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah ?
5. Apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah ?

METODE PENELITIAN

Obyek dari penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan dibatasi pada pejabat kepala bidang (eselon tiga) dan sub bidang (eselon empat). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 160 responden yang merupakan pejabat eselon tiga dan empat.

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, dimana target responden adalah aparat pemerintah daerah eselon tiga dan empat pada bagian perencanaan keuangan dan anggaran yang menangani dalam penyusunan anggaran pada Kantor Sekertaris Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan dengan menggunakan dan jumlah populasi α =sebanyak 0,05160 responden maka dapat diketahui banyaknya sampel yang diambil adalah sebanyak 113 responden (Usman, 2011 dan Sugiyono, 2011).

Berikut ini adalah definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini:

- a. **Partisipasi anggaran** yaitu tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan oleh individu dalam proses perencanaan

anggaran. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Partisipasi anggaran dapat diukur dengan 8 point pernyataan dalam kuesioner yang sebelumnya digunakan oleh Istiyani (2009) yang menunjukkan seberapa jauh aparat pemerintah daerah terlibat dalam penyusunan anggaran daerah dengan pengukuran menggunakan skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

- b. **Kejelasan tujuan anggaran** menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Kejelasan tujuan anggaran dapat diketahui dari seberapa jelas tujuan anggaran yang akan dicapai dan seberapa jauh anggaran tersebut dapat dimengerti berdasar pada penjelasan-penjelasan yang ada dalam anggaran. Kejelasan tujuan anggaran dapat diukur dengan 5 point pernyataan dalam kuesioner yang sebelumnya digunakan oleh Istiyani (2009) yang menunjukkan seberapa jauh aparat pemerintah daerah mengerti tujuan anggaran daerah dengan pengukuran menggunakan skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

- c. **Evaluasi anggaran** menunjuk pada sejauh mana selisih anggaran ditelusur ke masing-masing pimpinan unit kerja dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Evaluasi anggaran dapat diukur dengan 7 point pernyataan dalam kuesioner yang sebelumnya digunakan oleh Istiyani (2009) yang menunjukkan seberapa jauh aparat pemerintah daerah menelusur anggaran pada masing-masing unit kerja dan penggunaan anggaran untuk mengevaluasi kinerja dengan pengukuran menggunakan skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

- d. **Umpan balik anggaran** merupakan alat ukur sejauh mana individu mengetahui sampai dimana tujuan anggaran dan program kegiatan telah dicapai. Umpan balik anggaran dapat menunjukkan mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran. Sejauh mana aparat pemerintah daerah mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam menyusun anggaran sehingga membuat mereka dikatakan berhasil. Umpan balik anggaran dapat diukur dengan 7 point pernyataan dalam kuesioner yang sebelumnya digunakan oleh Istiyani (2009) yang menunjukkan seberapa jauh aparat pemerintah daerah mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran dan menggunakan anggaran dengan pengukuran menggunakan skala likret 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
- e. **Kesulitan tujuan anggaran** merupakan tingkatan kesulitan pencapaian tujuan anggaran program dan kegiatan yang dipersepsikan oleh individu dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kesulitan tujuan anggaran menunjukkan seberapa ketat atau seberapa sulit tujuan dapat dicapai. Kesulitan tujuan anggaran dapat diukur dengan 2 point pernyataan dalam kuesioner yang sebelumnya digunakan oleh Istiyani (2009) yang menunjukkan seberapa jauh persepsi aparat pemerintah daerah dalam menilai kesulitan tujuan anggaran dengan pengukuran menggunakan skala likret 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
- f. **Kinerja** merupakan prestasi yang

diperlihatkan atau kemampuan kerja seseorang. Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Kinerja dapat diukur dengan 12 point pernyataan dalam kuesioner yang sebelumnya digunakan oleh Istiyani (2009) yang menunjukkan seberapa jauh kinerja atau usaha aparat pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggaran dengan pengukuran menggunakan skala likret 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Sebagai variabel dependen adalah sikap aparat dan kinerja aparat pemerintah daerah, variabel independennya partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Berikut ini adalah tabel banyaknya kuesioner yang disebarkan dan dikembalikan.

Tabel Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Penyebaran Kuesioner	121	100%
Kuesioner tidak kembali	7	$7/121 \times 100\% = 5,78\%$
Kuesioner tidak dapat digunakan	1	$1/121 \times 100\% = 0,83\%$
Kuesioner digunakan oleh data	113	$113/121 \times 100\% = 93,39\%$

Kuesioner disebar sebanyak 121 buah, tidak kembali 7 buah dan kembali sebanyak 114 buah. Dari jumlah 114 kuesioner kembali hanya sebanyak 113 kuesioner yang dapat digunakan untuk olah data. Satu buah kuesioner tidak

dapat digunakan untuk olah data karena kuesioner tidak lengkap dalam pengisianya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk olah data.

Tabel Statistik Deskriptive

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi	Skewness	Kurtosis
Kinerja (Y)	113	2,25	4,42	3,60	0,355	-0,908	0,188
Partisipasi Anggaran (X1)	113	2,00	3,75	3,10	0,326	-0,321	0,486
Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)	113	3,20	4,60	3,78	0,299	0,563	0,078
Evaluasi Anggaran (X3)	113	1,57	4,14	3,16	0,475	-0,752	1,193
Umpan Balik Anggaran (X4)	113	1,57	4,14	3,11	0,374	-0,627	3,104
Kesulitan Tujuan Anggaran (X5)	113	1,50	4,00	2,89	0,457	-0,975	1,773

Data kuesioner yang telah didapat selanjutnya direkap dan dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan program SPSS. Hasil statistik pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel kinerja (Y) memiliki jumlah responden 113, dengan skor terkecil sebesar 2,25 dan skor tertinggi 4,42. Rata-rata skor yang didapat dari variabel ini adalah 3,60 dengan standar deviasi 0,355 hal tersebut berarti bahwa penyimpangan dari data variabel kinerja terhadap nilai rata-rata adalah sebesar 0,355. Hasil skewness dan kurtosis masing-masing menunjukkan nilai -0,908 dan 0,188 hal ini berarti data variabel kinerja (Y) terdistribusi secara normal, karena nilai tersebut mendekati nol. Variabel partisipasi anggaran (X1) menunjukkan jumlah responden sebanyak 113, dengan skor terkecil sebesar 2,00 dan skor

tertinggi 3,75. Rata-rata skor yang didapat dari variabel ini adalah 3,10 dengan standar deviasi 0,326 hal tersebut berarti bahwa penyimpangan dari data variabel partisipasi anggaran terhadap nilai rata-rata adalah sebesar 0,326. Hasil skewness dan kurtosis masing-masing menunjukkan nilai -0,321 dan 0,488 hal ini berarti data variabel partisipasi anggaran terdistribusi secara normal. Variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) menunjukkan jumlah responden sebanyak 113, dengan skor terkecil sebesar 3,20 dan skor tertinggi 4,60. Rata-rata skor yang didapat dari variabel ini adalah 3,78 dengan standar deviasi 0,299 hal tersebut berarti bahwa penyimpangan dari data variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap nilai rata-rata adalah sebesar 0,299 dimana nilai tersebut merupakan

nilai terkecil diantara standar deviasi keenam variabel. Hasil skewness dan kurtosis masing-masing menunjukkan nilai 0,563 dan 0,078 hal ini berarti data variabel kejelasan tujuan anggaran terdistribusi secara normal. Variabel evaluasi anggaran (X3) menunjukkan jumlah responden sebanyak 113, dengan skor terkecil sebesar 1,57 dan skor tertinggi 4,14. Rata-rata skor yang didapat dari variabel ini adalah 3,16 dengan standar deviasi 0,475 hal tersebut berarti bahwa penyimpangan dari data variabel evaluasi anggaran terhadap nilai rata-rata adalah sebesar 0,475 dimana nilai tersebut merupakan nilai terbesar diantara standar deviasi keenam variabel. Hasil skewness dan kurtosis masing-masing menunjukkan nilai -0,752 dan 1,193 hal ini berarti data variabel evaluasi anggaran terdistribusi secara normal hanya berdasar nilai skewness saja. Variabel umpan balik anggaran (X4) menunjukkan jumlah responden sebanyak 113, dengan skor terkecil sebesar 1,57 dan skor tertinggi 4,14. Rata-rata skor yang didapat dari variabel ini adalah 3,11 dengan standar deviasi 0,374 hal tersebut berarti bahwa penyimpangan dari data variabel umpan balik anggaran terhadap nilai rata-rata adalah sebesar 0,374. Hasil skewness dan kurtosis masing-masing menunjukkan nilai -0,627 dan 3,104 hal ini berarti data variabel umpan balik anggaran terdistribusi secara normal hanya berdasar nilai skewness saja. Variabel kesulitan tujuan anggaran (X5) menunjukkan jumlah responden sebanyak 113, dengan skor terkecil sebesar 1,50 dan skor tertinggi 4,00. Rata-rata skor yang didapat dari variabel ini adalah 2,89 dengan standar deviasi 0,457 hal tersebut berarti bahwa penyimpangan dari data variabel evaluasi anggaran terhadap nilai rata-rata cukup besar yaitu sebesar 0,457. Hasil skewness dan kurtosis masing-masing menunjukkan nilai -0,975 dan 1,773 hal ini berarti

data variabel kesulitan tujuan anggaran terdistribusi secara normal hanya berdasar nilai skewness saja.

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan *SPSS* untuk masing-masing pertanyaan yang menjelaskan suatu variabel dapat dilihat pada tabel 4.4 pengujian validitas dapat dilihat dari nilai *r* (nilai korelasi) yang bersifat positif atau lebih besar daripada nilai *r* tabel dengan tingkat signifikansi yang ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tingkat signifikansi pada level 0,05. Jika nilai signifikansi lebih rendah daripada 0,05 maka indikator atau pertanyaan yang mewakili variabel tersebut dikatakan valid. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang mewakili variabel dalam kuesioner berkorelasi positif sehingga dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi jawaban responden terhadap suatu pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner (Ghozali, 2012). Karena suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Kriteria yang digunakan dalam uji reliabilitas pertanyaan dalam kuesioner adalah dengan membandingkan pertanyaan yang satu dengan yang lain dan mengukur korelasi antar jawaban dengan statistic *Cronbrach Alpha* dimana nilai *Cronbrach Alpha* harus lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan *SPSS* untuk masing-masing pertanyaan yang menjelaskan suatu variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Nilai Cronbach Alpha Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kinerja (Y)	0,724	0,724 > 0,60 Reliabel
2	Partisipasi Anggaran (X1)	0,609	0,609 > 0,60 Reliabel
3	Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)	0,713	0,713 > 0,60 Reliabel
4	Evaluasi Anggaran (X3)	0,735	0,735 > 0,60 Reliabel
5	Umpan Balik Anggaran (X4)	0,605	0,605 > 0,60 Reliabel
6	Kesulitan Tujuan Anggaran (X5)	0,695	0,696 > 0,60 Reliabel

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang mewakili variabel dalam kuesioner mempunyai nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan reliabel. Hal ini berarti bahwa item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dinyatakan handal dan dapat digunakan untuk penelitian.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda untuk

mengetahui pengaruh variabel independen Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Evaluasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran dan Kesulitan Tujuan Anggaran terhadap variabel dependen Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, analisis ini menggunakan program *SPSS* dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel independen	Coofisien Beta		t		Interpretasi
	Unstandardized	Hitung	Sig		
(Constant)	0,920	1,706	0,091		
Partisipasi Anggaran	0,284	2,905	0,004*		Berpengaruh
Kejelasan Tujuan Anggaran	0,374	3,456	0,001*		Berpengaruh
Evaluasi Anggaran	0,025	0,373	0,710		Tidak Berpengaruh
Umpan Balik Anggaran	-0,020	-0,231	0,818		Tidak Berpengaruh
Kesulitan Tujuan Anggaran	0,126	1,858	0,066		Tidak Berpengaruh
R = 0,485		F hitung = 6,581			
R Square = 0,235		Sig. = 0,000*			
Adjusted R Square = 0,199					

Keterangan: *) Signifikan pada level 0,05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda.

Partisipasi anggaran menunjukkan pada sejauh mana aparat pemerintah daerah

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran secara umum dapat meningkatkan kinerja aparat yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Apabila aparat pemerintah daerah

mengerti benar tentang sejauh mana anggaran yang dibuat dan sejauh mana aparat terlibat dalam penyusunan anggaran maka diharapkan aparat tersebut memiliki kinerja yang baik.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemda, ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat Pemda, sebaliknya jika partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran turun maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Semakin tinggi keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran tersebut akan mendorong para aparat untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembanya sehingga dapat meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan akan tercapai.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Istiyani (2009) yang menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Hasil ini juga semakin memperkuat penelitian Munawar, dkk. (2006) dan Wahyuni (2008), yang menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah adalah spesifik dan jelas, sehingga meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.

b. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda.

Kejelasan tujuan anggaran menunjukan seberapa spesifik, seberapa jelas tujuan anggaran yang disusun. Apabila anggaran memiliki tujuan yang jelas maka pencapaian tujuan semakin jelas sehingga mempengaruhi kinerja aparat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kejelasan tujuan anggaran menyebabkan aparat pemerintah daerah semakin mengerti target-target yang akan dicapai dimasa datang.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat Pemda, ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sebaliknya jika kejelasan tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Kejelasan tujuan anggaran menyebabkan aparat pemerintah daerah semakin mengerti target-target yang akan dicapai dimasa datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Istiyani (2009) dan Wahyuni (2008) yang menemukan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dan Yogyakarta. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian Munawar, dkk. (2006) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Namun demikian, hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Kenis (1979) dalam Istiyani (2009) yang meneliti pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku dan kinerja manajerial dengan subjek penelitian manajer departemen menemukan bahwa kejelasan tujuan anggaran memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja penganggaran.

c. Evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda.

Evaluasi anggaran dapat menunjukan selisih anggaran yang disusun dan pada kenyataannya. Dengan evaluasi anggaran dapat diketahui apakah kinerja aparat tersebut dalam menyusun anggaran sudah baik atau belum. Sehingga evaluasi anggaran dapat digunakan untuk evaluasi kinerja. Karena evaluasi anggaran dapat digunakan untuk evaluasi kinerja diharapkan secara langsung evaluasi anggaran dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel evaluasi anggaran terhadap variabel

kinerja aparat Pemda. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Istiyani (2009) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Selain itu juga mendukung penelitian Munawar, dkk. (2006) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas variabel evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Hal ini berarti bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan pada Pemda Kabupaten Banjarnegara belum efektif dalam arti evaluasi anggaran tidak dapat mengungkap sejauh mana pertanggungjawaban aparat dalam melaksanakan tugasnya sehingga evaluasi anggaran tidak dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara.

d. Umpun balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda.

Umpun balik anggaran menunjukkan hasil atau sejauh mana tujuan anggaran dapat dicapai. Karena umpun balik anggaran dapat menunjukkan seberapa efektif kinerja aparat dalam merealisasikan anggaran. Dengan adanya umpun balik anggaran maka dapat diketahui seberapa besar kinerja aparat dalam tanggung jawabnya merealisasikan anggaran yang telah disusun. Diharapkan umpun balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel umpun balik anggaran terhadap variabel kinerja aparat Pemda. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Istiyani (2009) dan yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel umpun balik anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Dengan adanya umpun balik anggaran maka dapat diketahui seberapa besar kinerja aparat dalam tanggung jawabnya merealisasikan anggaran yang telah disusun. Namun penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Munawar, dkk. (2006) dan Wahyuni (2008) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel umpun balik anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa umpun balik yang diterima aparat pemerintah daerah masih rendah, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Mia (2012), faktor yang menyebabkan rendahnya umpun balik tersebut salah satunya adalah ketidakpahaman pengguna anggaran dalam menilai hasil kinerja penyusunan anggaran.

e. Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda.

Kesulitan tujuan anggaran menunjukkan seberapa ketat tujuan anggaran dan seberapa sulit tujuan anggaran untuk dicapai. Dikarenakan semakin sulit tujuan anggaran yang ditetapkan maka secara langsung aparat pemerintah daerah semakin berusaha untuk mencapai target anggaran. Tujuan anggaran yang sulit akan menimbulkan tekanan pada aparat dan memotivasi aparat sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja aparat daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel kesulitan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja aparat Pemda. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istiyani (2009) dan Munawar, dkk. (2006) yang menemukan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung dan Kupang. Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja, hal tersebut dikarenakan rendahnya persepsi karyawan tentang kesulitan tujuan anggaran, sehingga sulit atau tidaknya tujuan anggaran tidak dapat meningkatkan motivasi atau mempengaruhi kinerja aparat pemda dalam pelaksanaan pencapaian tujuan anggaran. Seperti yang dijelaskan oleh Mia (2012) bahwa

kesulitan pencapaian tujuan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap sikap dalam menilai kinerja aparat pemda dikarenakan adanya kendala teknis dan non teknis didalam pelaksanaannya. Selain itu didalam pelaksanaan anggaran terdapat ketidaksesuaian pada tujuan anggaran.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut (1) Peneliti selanjutnya agar menambahkan atau mengganti variabel dependen yang digunakan dalam penelitian seperti sikap atau perilaku aparat. Seperti yang dikemukakan oleh Munawar, dkk. (2006) bahwa perilaku dan sikap aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga dipengaruhi oleh karakteristik tujuan anggaran. Karakteristik tujuan anggaran dapat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap karena perilaku dan sikap aparat dalam menyusun rencana anggaran ditentukan oleh pemahaman aparat mengenai karakteristik tujuan anggaran. (2) Pemerintah daerah Banjarnegara diharapkan lebih memperketat evaluasi anggaran dengan cara meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan evaluasi anggaran dan dengan menelusur adanya penyimpangan anggaran secara tuntas agar pelaksanaan evaluasi anggaran dapat efektif. Selain itu, aparat pemerintah daerah Banjarnegara diharapkan dapat memanfaatkan umpan balik pada akhir siklus anggaran untuk digunakan dalam periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Istiyani. (2009). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)*. Tesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mediaty. (2010). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Gaya Kepemimpinan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Majalah Ekonomi No 3.
- Mia, Milayanti. (2012). *Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap Sikap Aparat Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya)*. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 1.
- Munawar, Gugus Irianto dan Nurkholis. (2006). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Tersedia di ;http://djkd.depdagri.go.id/file/statis/BaganAlirSiklus_permen_13_2006.pdf. Diakses pada 17 November 2012.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.

Sugiyono. (2011). *Statistika Untuk Penelitian, cetakan ke sembilan belas*. CV Alfabeta. Bandung.

Usman, Husaini. (2011). *Pengantar Statistika, cetakan ke lima*. Edisi 2. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahyuni, Ulfia. (2008). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran SKPD terhadap Perilaku, Kinerja dan Sikap Aparat Pemerintah Daerah*. Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.